

INTI SARI

**Tommy Bramtheo Hutagaol 220510160 Analisis Sosio-Yuridis Kriminalisasi
Masyarakat Adat Akibat Konflik Kepemilikan
Hak Ulayat Yang Dilakukan Oleh PT, Toba
Pulp Lestari Di Dusun Natinggir**

**(Prof. Dr. Jamaluddin S.H.,M.Hum dan
Sumiadi S.H.,M.Hum)**

Konflik agraria antara korporasi pemegang izin konsesi dan masyarakat yang mengklaim hak ulayat merupakan persoalan berulang dalam ruang lingkup Kabupaten Toba, terutama ketika instrumen hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang pada dasarnya bersifat keperdataan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konflik kepemilikan tanah ulayat antara sekelompok masyarakat di Dusun Natinggir, dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan pemegang izin konsesi kehutanan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif, yang menggabungkan kajian norma hukum positif dengan data primer dari informan, responden dan narasumber melalui wawancara yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. Hasil penelitian menjawab bahwa proses peminanaan dalam sengketa Dusun Natinggir bukanlah sebuah kriminalisasi sistematis terhadap identitas masyarakat adat, melainkan penegakan hukum objektif atas pelanggaran delik pidana murni (seperti pengrusakan dan kekerasan). Hal ini dibuktikan dari ketiadaan *legal standing* akibat belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Masyarakat Hukum Adat, penguasaan lahan yang sangat disproportional oleh sekelompok kecil perantau yang bukan penduduk asli originari, serta tindakan penyelesaian konflik yang menggunakan cara anarkis. Guna mengurai benang kusut konflik ini, solusi yang atas konflik tersebut mencakup mediasi terpadu oleh Forkopimda dan penerapan *restorative justice* bersyarat bagi delik subsisten dengan tetap menindak tegas pelaku anarkisme. Sebagai langkah perbaikan ke depan, aparat penegak hukum setempat disarankan untuk mengedepankan pendekatan preventif dengan memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hierarki perundang-undangan, sehingga masyarakat memahami bahwa perusahaan pemegang Surat Keputusan (SK) konsesi memiliki *legal standing* yang sah dan lahan tidak dapat diklaim secara sepihak. Selain itu, Pemerintah Daerah, BPN, dan kementerian terkait harus segera bersinergi untuk mempercepat pembentukan Perda pengakuan Masyarakat Hukum Adat, melakukan penataan ulang tata ruang pasca dicabutnya SK konsesi PT TPL, serta memfasilitasi pengajuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar masyarakat memperoleh kepastian hak milik yang sah dan berkeadilan.

Kata Kunci : Kriminalisasi, Konflik Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Sosio-yuridis

ABSTRACT

Tommy Bramtheo Hutagaol 220510160 *Socio-Juridical Analysis of the Criminalization of Indigenous Communities Arising from Customary Land Right Disputes Involving PT Toba Pulp Lestari in Natinggir Hamlet*

(Prof. Dr. Jamaluddin S.H.,M.Hum and Sumiadi S.H.,M.Hum)

Agrarian conflicts between concession-holding corporations and communities claiming customary land rights are recurring issues in Toba Regency, particularly when criminal law instruments are employed to resolve disputes that are essentially civil in nature. This study examines the conflict over customary land ownership between a community group in Natinggir Hamlet and PT Toba Pulp Lestari (TPL), a forestry concession holder in North Sumatra Province. Employing a descriptive, empirical-juridical research method, the study combines an analysis of positive legal norms with primary data gathered through interviews with informants, respondents, and resource persons knowledgeable about the subject matter. The findings indicate that the criminal proceedings regarding the Natinggir Hamlet dispute did not constitute a systematic criminalization of indigenous identity, but rather an objective enforcement of the law against distinct criminal offenses (such as property destruction and acts of violence). This conclusion is supported by the absence of legal standing due to the lack of a Toba Regency Regional Regulation on Customary Law Communities as well as the disproportionate land occupation by a small group of migrants who were not indigenous to the area, and the use of anarchic methods to resolve the conflict. To untangle this complex conflict, proposed solutions include integrated mediation by the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) and the application of conditional restorative justice for subsidiary offenses, while maintaining firm action against perpetrators of anarchy. As a forward-looking measure, local law enforcement agencies are advised to prioritize a preventive approach by providing legal outreach and education regarding the hierarchy of laws and regulations; this aims to ensure the community understands that companies holding concession decrees possess valid legal standing and that land cannot be claimed unilaterally. Furthermore, the local government, the National Land Agency (BPN), and relevant ministries must immediately collaborate to accelerate the enactment of local regulations recognizing Customary Law Communities, reorganize spatial planning following the revocation of PT TPL's concession decree, and facilitate applications for Agrarian Reform Object Lands (TORA) so that the community secures legitimate and equitable ownership rights.

Keywords: *Criminalization, Customary Land Rights Conflict, Indigenous Communities, Socio-Juridical*